

**ANALISIS HUBUNGAN NEPAL-INDIA DALAM ASPEK POLITIK DAN  
EKONOMI**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen  
Ilmu Hubungan Internasional*

**Disusun Oleh:**

**INDRA**

**E061191095**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**SKRIPSI**

**ANALISIS HUBUNGAN NEPAL-INDIA DALAM ASPEK POLITIK DAN  
EKONOMI**

**Disusun dan diajukan oleh :**

**Indra**

**E061191095**

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada*

*Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

*Universitas Hasanuddin*

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : ANALISIS HUBUNGAN NEPAL-INDIA DALAM ASPEK  
POLITIK DAN EKONOMI

N A M A : INDRA

N I M : E061191095

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 12 Mei 2023



Mengetahui :

Pembimbing I,

**Agussalim, S.IP, MIRAP**  
NIP. 197608182005011003

Pembimbing II,

**Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA**  
NIDN. 0906108902

Mengesahkan :

Ketua Departemen Hubungan Internasional,

**Prof. Drs. H. Darwis, MA., Ph.D.**  
NIP. 196201021990021003

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : INDRA  
NIM : E061191095  
PROGRAM STUDI : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
JENJANG : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul :

***“ANALISIS HUBUNGAN NEPAL-INDIA DALAM ASPEK POLITIK DAN  
EKONOMI”***

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 12 Mei 2023

Yang Menyatakan



(Indra)

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Hasanuddin, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : INDRA  
NIM : E061191095  
PROGRAM STUDI : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JENIS KARYA : ILMIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Hasanuddin, **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“ANALISIS HUBUNGAN NEPAL-INDIA DALAM ASPEK POLITIK DAN EKONOMI”**

Bersama perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Hasanuddin berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Makassar, 12 Mei 2023

Yang Menyatakan



(Indra)

## KATA PENGANTAR

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas berkah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini. Setelah melalui serangkaian proses dan dinamika, penulis pada akhirnya dapat merampungkan skripsi yang berjudul “**Analisis Hubungan Nepal-India dalam Aspek Politik dan Ekonomi**” ini sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi penulis untuk menyelesaikan studi strata satu di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Dimulai sejak tahun 2022, proses penyusunan skripsi ini diwarnai dinamika dan tidak sepenuhnya seperti yang pada mulanya penulis rencanakan. Saat proses penelitian berlangsung, penulis menyadari bahwa memungkinkan terdapat kekurangan baik itu dari segi penyajian data pendukung, serta kongruensi antara kerangka konsep dengan analisis pada pembahasan. Mengingat kekurangan-kekurangan dan hambatan dalam penyusunan skripsi ini, inkongruensi dapat saja ditemukan dalam analisis data dan konsep yang penulis gunakan namun meskipun demikian penulis telah melakukan upaya maksimal untuk mereduksi kemungkinan tersebut.

Terlepas dari berbagai kekurangan baik dari segi struktur, substansi, maupun cara penulis mengelaborasi isi skripsi ini. Penulis menaruh harapan agar skripsi ini dapat memberikan kontribusi dalam diskursus Hubungan Internasional Khususnya sebagai tambahan referensi terkait kajian Kawasan Asia Selatan dalam

hal ini hubungan bilateral Nepal-India. Mengingat krusialnya ilmu pengetahuan untuk dikembangkan penulis dengan senang hati terbuka akan segala kritik dan saran maupun diskusi terkait substansi materi dalam skripsi ini, dengan demikian penulis akan terus belajar dan mengembangkan diri agar skripsi ini tidak menjadi titik akhir dalam perjalanan pencarian ilmu pengetahuan penulis. Seluruh rangkaian proses penyusunan skripsi ini akan menjadi pelajaran berharga bagi penulis untuk terus menorehkan karya yang lebih komprehensif di masa yang akan datang.

Sebagai penutup dari kata pengantar ini, penulis berkenan menyampaikan terima kasih kepada segenap pihak-pihak yang telah turut berkontribusi selama proses penyusunan skripsi ini serta selama penulis menjadi salah satu mahasiswa beruntung untuk menempuh S1 Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Hasanuddin:

1. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tanpa pertolongan-Nya, penulis tidak akan mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan, doa, dan semangat selama proses penulisan skripsi ini. Penulis tidak akan pernah mampu menyelesaikan tugas akhir ini tanpa dukungan dari orang-orang terdekat penulis. Dukungan dari keluarga penulis sangat membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

3. Dosen pembimbing skripsi penulis sekaligus sosok pengajar yang telah memberikan kesan luar biasa kepada penulis sejak awal perkuliahan, Bpk. Agussalim, S.IP, MIRAP yang juga telah memberi kesempatan kepada penulis untuk ikut serta dalam penelitiannya dan Ibu Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA Terima kasih banyak atas waktu, ilmu, diskusi, bimbingan, dan kepercayaannya terkait penelitian penulis selama ini.
4. Segenap Dosen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin atas dedikasinya menyalurkan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga yang bermanfaat bagi penulis hingga akhir studi, semoga akan selalu menjadi pribadi yang hebat, menjadi inspirasi penulis dan bekal pengetahuan penulis di masa-masa yang akan datang.
5. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dan sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan motivasi selama proses penulisan skripsi ini. Kepada teman-teman KKN penulis khususnya Canrego Gang, Posko BTP, Tamu Kos, Grup Bergerombol Liar dan sahabat penulis Wayan Winda Armisa dan Vanissa Nugrah Aulia yang selalu bersedia mendengarkan keluh-kesah penulis selama pengerjaan skripsi ini. Dukungan dari teman-teman penulis sangat membantu dalam menjaga motivasi dan semangat penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu namun telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Ada banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, dan penulis sangat berterima kasih atas kontribusi mereka.

Rincian ucapan terima kasih yang penulis sampaikan diatas tidak maampu menjangkau rasa syukur dan terima kasih yang penulis rasakan selama menempuh studi S1 di prodi Ilmu Hubungan Internasional di Universitas hasanuddin. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa setiap momen yang tercipta, kisah yang terukir, hingga individu yang penulis temui dalam setiap langkah dan ayunan tangan perjalanan penulis memiliki makna yang tak akan mampu dideskripsikan secara holistik. Terakhir dan yang paling krusial, skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua, Mr. Anto dan Mrs. Hasnidar yang telah mendedikasikan jerih payahnya baik materi maupun moral kepada penulis.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana harapan penulis.

Terima kasih.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Makassar, 3 April 2023



(INDRA)

## ABSTRAK

Indra, E061191095 dengan judul skripsi “Analisis Hubungan Nepal-India dalam Aspek Politik dan Ekonomi” di bawah bimbingan Agussalim, S.IP, MIRAP selaku pembimbing I dan Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA selaku pembimbing II pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan Nepal-India dalam aspek politik dan ekonomi dengan menggunakan teori asimetris dan konsep hubungan bilateral. Bagian pertama dari penelitian ini menganalisis aspek politik dari hubungan Nepal-India dan mengeksplorasi konteks historis hubungan kedua negara, menyoroti bagaimana ukuran dan kekuasaan India sering digunakan untuk menegaskan dominasinya atas Nepal dan campur tangan India dalam urusan politik dalam negeri Nepal. Bagian kedua dari penelitian ini menganalisis aspek ekonomi dari hubungan Nepal-India. Meskipun kedua negara telah meresmikan berbagai perjanjian bilateral, kedaulatan ekonomi Nepal secara konsisten dikompromikan oleh intervensi India, dan Nepal telah dipaksa untuk bergantung pada India untuk perdagangan, investasi, dan bantuan asing. Dominasi perusahaan India di pasar Nepal telah menghambat persaingan dan membatasi peluang bisnis dan industri bagi masyarakat Nepal. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan asimetris pada hubungan Nepal-India, sehingga Nepal perlu membangun hubungan yang lebih seimbang dengan memiliki otonomi yang lebih besar dalam keputusan ekonomi dan politiknya. Sebaliknya, India perlu mengakui status Nepal sebagai negara merdeka dan berdaulat.

**Kata Kunci** : *Nepal, India, Asimetris, Ekonomi, Politik, Negara Merdeka dan Berdaulat.*

## ABSTRACT

*Indra, E061191095. In “Analysis of Nepal-India Relations in Political and Economic Aspects”, Under the guidance of Agussalim, S.IP, MIRAP as Supervisor I and Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA as Supervisor II at Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, Makassar.*

*This study aims to analyze Nepal-India relations in political and economic aspects using asymmetric theory and the concept of bilateral relations. The first section of this study analyzes the political aspects of the Nepal-India relationship and explores the historical context of the relationship, highlighting how India's size and power have often been used to assert its dominance over Nepal and India's interference in Nepal's internal affairs. The second section of the study analyzes the economic aspect of the Nepal-India relationship. Despite formalizing various bilateral agreements, Nepal's economic sovereignty has been consistently compromised by India's interventions, and Nepal has been forced to rely on India for trade, investment, and foreign aid. The dominance of Indian firms in the Nepali market has stifled competition and limiting opportunities for Nepali businesses and industries. The results of this study show that there is an asymmetric relationship in Nepal-India relations, therefore, Nepal needs to build a more balanced relationship by having greater autonomy in its economic and political decisions. And as of India, it needs to recognize Nepal as an independent and sovereign state.*

**Keywords** : *Nepal, India, Asymmetric, Economy, Politics, Independence and Sovereign State .*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Kerangka Konseptual .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Teori Asimetris.....	20
B. Konsep Hubungan Bilateral .....	25
C. Penelitian Terdahulu .....	31
BAB III GAMBARAN UMUM HUBUNGAN BILATERAL NEPAL-INDIA..	33
A. Kondisi Ekonomi dan Politik Nepal dan India .....	33
B. Hubungan Bilateral Nepal-India .....	67

BAB IV ANALISIS HUBUNGAN NEPAL-INDIA DALAM ASPEK POLITIK DAN EKONOMI .....	74
A. Hubungan Nepal-India dalam Aspek Politik .....	75
B. Hubungan Nepal-India dalam Aspek Ekonomi .....	86
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA .....	100

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Share in GDP dan Real GDP Growth .....	53
Tabel 3.2. Annual Average Inflation.....	55
Tabel 4.1. Sumber Pendapatan Nepal pada Tahun Fiskal 2021/2022.....	88
Tabel 4.2. Volume Perdagangan Tahunan Nepal dengan India.....	89
Tabel 4.3. FDI di Nepal.....	92
Tabel 4.4. FDI India dalam Sejumlah Sektor Utama di Nepal .....	93
Tabel 4.5. Sumber Hibah & Pinjaman Luar Negeri Nepal .....	96

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Skema Kerangka Konseptual .....	8
Gambar 3.1. Year-on-year Consumer Price Inflation .....	54
Gambar 3.2. Perbandingan Perwakilan Partai-Partai India.....	60
Gambar 3.3. Year-on-year growth rates of GVA at basic price, India, Quarterly series, 2004-2005 and 2011-2012 .....	61
Gambar 3.4. Investment rate and saving rate, India, annual, 2003-2019 (percentage of GDP) .....	61
Gambar 3.5. Share of exports values in GDP and Growth of Merchandise exports, India, 2005-2006 to 2019-2020 (percentage).....	62
Gambar 3.6. Monthly growth rates in domestic credit supply, India, 2004-2020 (percentage).....	62
Gambar 3.7. Unemployment rates, India, 2004-2005 to 2018-2019, principal plus subsidiary status (percentage).....	64
Gambar 3.8. Head count ratios of income poverty, India, 1993-1994 to 2017-2018 (percentage).....	64
Gambar 3.9. Central government expenditure as share of GDP, India, 2004-2020 (Percentage).....	65

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada awalnya Asia dibatasi oleh kekuatan kolonial barat yang pada dasarnya untuk memenuhi agenda politik mereka (Schendel & Maaker, 2014). Di Asia Selatan, Inggris hadir dan menciptakan perbatasan untuk mempromosikan tujuan politik-nya. Studi tentang sejarah perbatasan India-Nepal memberikan rincian menarik tentang perbatasan Asia Selatan. Sebelum kedatangan Inggris, India dan Nepal merupakan ruang teritorial bersama antara kedua negara (Kansakar, 2001). Demarkasi resmi perbatasan India-Nepal adalah hasil dari perang Inggris-Nepal pada tahun 1814 yang juga dikenal sebagai perang Gurkha. Ini adalah bagian penting dari sejarah India dan Nepal (Pemble, 2009). Perang Gurkha berakhir dengan Perjanjian Sugauli (1816). Perjanjian ini untuk pertama kalinya menciptakan perbatasan formal antara India dan Nepal. Kemudian Inggris mendefinisikan ulang perbatasan antara India dan Nepal untuk kedua kalinya pada tahun 1857.

Tahun 1857 merupakan peristiwa sejarah India, yaitu tahun ketika tentara India yang direkrut oleh *East Indian Company* memberontak. Pemberontakan tahun 1857 di dalam *East Indian Company* menimbulkan ancaman yang akan segera terjadi terhadap ambisi Inggris di India (Tripathi, 2019). Pada saat itu, Jung Bahadur Rana (1817–1877) yang merupakan penguasa Nepal menawarkan bantuan kepada *East Indian Company*. Pada tahun 1857 Jung Bahadur menawarkan pasukan militer-nya kepada Pemerintah India untuk membantu menghentikan pemberontakan. Setelah pemberontakan 1857, kekuasaan untuk

memerintah India dipindahkan dari *East India Company* ke *British Crown*. Setelah berhasil mengambil alih India, Inggris mengapresiasi dukungan Nepal kepada *East India Company*. Nepal juga mengirim pasukan militernya untuk berjuang membantu Inggris pada Perang Dunia I.

Melihat komitmen Nepal untuk konsisten memberikan bantuan, Inggris akhirnya mengakui Nepal sebagai sebuah negara yang merdeka (Tripathi, 2019). Pengakuan Nepal sebagai negara merdeka oleh Inggris melahirkan sebuah perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1923 dengan tujuan memperbaiki perbatasan antara India dan Nepal secara permanen. Pasal I perjanjian 1923 memuat status garis demarkasi permanen antara India dan Nepal yang menyatakan bahwa terdapat perdamaian dan persahabatan abadi antara pemerintah Inggris Raya dan Nepal, dan kedua pemerintah sepakat untuk saling mengakui dan menghormati kemerdekaan satu sama lain baik internal maupun eksternal.

Nepal adalah sebuah *landlock country* yang dikelilingi daratan, di bagian timur, barat, dan selatan oleh India dan di utara oleh Cina. Nepal berbagi perbatasan terbuka 1.868 km dengan lima negara bagian India (Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Benggala Barat dan Sikkim) dan 1.415 km dengan Cina (Tibet) (Sahu, 2015).

Nepal sebagai negara yang terkurung oleh daratan dengan kondisi negara terbelakang dimana perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik sangat bergantung pada bantuan eksternal (Nayak, 2009). Dalam politik internasional, setiap negara memiliki kebijakan luar negeri untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Nepal yang terletak di antara dua negara adidaya besar Asia yaitu

Cina dan India, dalam upaya mencapai kepentingan nasionalnya cenderung bergantung dengan kebijakan negara tetangganya khususnya India. Sehingga, hal tersebut berdampak pada kebijakan yang dihasilkan tidak dapat memberikan manfaat maksimal bagi negara (Dahal, 2021).

Fenomena ini terjadi dikarenakan adanya kesalahan pengambilan kebijakan oleh pemerintah otokratis Nepal di masa lalu yang masih di bawah pemerintahan rezim Rana yang melihat hubungan kedua negara berdasarkan hubungan baik dengan pemerintah Inggris yang saat itu menjajah India. Rana menyetujui perjanjian perdamaian dan persahabatan yang selanjutnya menjadi acuan dalam membentuk berbagai perjanjian antara Nepal dan India. Selain itu, penyebaran komunisme di Cina dan klaim Cina atas Tibet membuat India dan Nepal merasa cemas tentang keamanan nasional mereka (Karki & Paudel, 2015). Kondisi tersebut juga turut melatarbelakangi ditandatanganinya perjanjian perdamaian dan persahabatan oleh Nepal dan India secara resmi pada tahun 1950 (Karki & Paudel, 2015).

Perjanjian tersebut bukanlah sebuah perjanjian aliansi militer formal, melainkan hanya sebuah pakta pertahanan antara kedua negara. Perjanjian ini melegalkan perbatasan terbuka antara India dan Nepal yang memungkinkan aktivitas transfer barang dan jasa tanpa batas. Bagi Nepal sebagai negara yang terkurung oleh daratan, perjanjian ini berperan penting karena membuka sarana transit untuk perdagangan internasional. Namun demikian, meskipun tidak ada batasan pada aktivitas transfer barang dan jasa, terdapat 15 titik utama yang menjadi pintu keluar-masuk yang telah disepakati oleh kedua negara untuk aktivitas perdagangan (Karki & Paudel, 2015). Dengan demikian, setiap hambatan

di perbatasan berpotensi membahayakan Nepal karena 15 titik utama tersebut berperan vital bagi perekonomian Nepal.

Perjanjian ini telah menjadi tonggak sejarah dalam membangun hubungan persahabatan di bidang perdagangan dan keamanan. Tapi pada kenyataannya perjanjian ini selalu menjadi subjek perdebatan karena telah menciptakan hubungan asimetris antara Nepal dan India, yang dimana India lebih banyak diuntungkan dalam perjanjian tersebut. Selain itu, Perjanjian ini di gunakan oleh India sebagai sebuah instrumen agar Nepal selalu berada dibawah *security framework*-nya (Karki & KC, 2020). Berdasarkan catatan sejarah, India telah menggunakan perjanjian tersebut sebagai sebuah instrumen untuk menghentikan Nepal meningkatkan hubungan dengan Cina.

Setiap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Nepal yang bertentangan dengan kepentingan India maka akan direspon oleh pemerintah India dengan pemberlakuan blokade ekonomi, untuk mempengaruhi serta mendorong Nepal agar selalu bergantung kepada India. Salah satu bentuk tekanan pemerintah India terhadap Nepal yaitu pemberlakuan blokade ekonomi pada Maret tahun 1989. Penyebab pemerintah India melakukan tindakan tersebut dilatarbelakangi oleh keputusan Nepal pada pertengahan tahun 1988 untuk melakukan transaksi pembelian senjata yang berasal dari Cina (Karki & KC, 2020) dan memberlakukan pungutan tarif/bea masuk sebanyak 55% atas barang-barang India yang memasuki Nepal (Kumar, 2020). Merespon hal tersebut India menutup 19 dari 21 perbatasannya yang terhubung dengan Nepal.

Melihat pengaruh India yang begitu besar, para pemimpin partai politik Nepal selalu waspada terhadap kebijakan yang mereka bentuk, karena perubahan

kebijakan dapat memicu pemerintah India untuk menerapkan kebijakan serupa yang terjadi di masa lalu yang akan berdampak buruk bagi negara dan membahayakan rezim mereka. Selain itu, setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah Nepal untuk menyeimbangkan hubungan dengan India selalu berakhir dengan kegagalan, hal tersebut terbukti setelah serangkaian blokade ekonomi yang diberlakukan pemerintah India terhadap Nepal dari tahun ke tahun, mulai pada tahun 1969, 1970, 1989, dan 2015 (Pant, 2018).

Sepanjang sejarah, ketergantungan Nepal terhadap ekonomi India di sebagian besar perdagangannya telah menjadi sebuah masalah serius bagi kedaulatan Nepal. India berfungsi sebagai pasar utama untuk kegiatan ekspor dan impor, dengan 60% kegiatan ekspor komoditas Nepal berhubungan langsung dengan India, sedangkan 80% kegiatan impor dilakukan melalui India yang menyediakan satu-satunya akses laut melalui pelabuhan Kalkuta (Nayak, 2016). Selama bertahun-tahun, ketergantungan ekonomi Nepal terhadap India yang terus-menerus meningkat telah melahirkan “Sentimen Anti-India” di kalangan rakyat.

Rakyat Nepal menganggap bahwa kondisi Nepal yang ketergantungan terhadap India menciptakan peluang dan pengaruh bagi India untuk mendorong Nepal merumuskan kebijakan sesuai dengan keinginannya. Hal tersebut diperparah dengan adanya fenomena partai-partai politik terkemuka Nepal yang secara konsisten tidak dapat menciptakan kebijakan yang bermanfaat bagi kepentingan nasional Nepal, terutama kebijakan yang dapat mengurangi ketergantungan Nepal terhadap India. Ketidakmampuan partai-partai politik tersebut dikarenakan kurangnya persatuan diantara para pemimpin partai, dimana

kebijakan hanya dibentuk semata-mata berdasarkan kepentingan dan keuntungan pribadi (Dahal, 2012).

Sejak awal India menjalin hubungan bilateral dengan Nepal, India telah memberikan bantuan kepada Nepal pada sebagian besar masalah politik dan ekonomi, namun seiring berjalannya waktu India mulai mendominasi hubungan. Pada tahun 2015 India menjadi agresif dengan menerapkan pemberlakuan blokade ekonomi secara tidak resmi terhadap Nepal. Hal tersebut terjadi setelah disahkannya konstitusi baru Nepal pada 20 September 2015 yang membatasi campur tangan pemerintah India terhadap politik dalam negeri Nepal (Dahal, 2021).

Substansi konstitusi baru tersebut menyatakan bahwa secara konstitusional, kebijakan luar negeri Nepal harus dipandu oleh prinsip-prinsip direktif yang mencakup perlindungan kebebasan, kedaulatan, integritas teritorial, kemerdekaan, dan kebijakan luar negeri berdasarkan *Panchasheel (The Five Principles of Peaceful Co-existence)* (Barik, 2021), Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, prinsip *non-alignment*, hukum internasional dan perdamaian dunia yang secara keseluruhan adalah prinsip dan arahan umum untuk kebijakan luar negeri Nepal (*The Constitution of Nepal*, 2020). Dalam praktiknya, kebijakan luar negeri Nepal tidak diarahkan untuk memproyeksikan pengaruh secara internasional tetapi untuk mempertahankan otonomi dan melindungi kedaulatan dalam menangani masalah domestik, ekonomi dan keamanan (Dahal, 2019).

Lebih lanjut, hubungan bilateral Nepal-India telah berulang kali mengalami gejolak. Berdasarkan catatan sejarah, India telah memberlakukan blokade ekonomi terhadap Nepal sebanyak empat kali. Serangkaian blokade

ekonomi tersebut terjadi karena Nepal berupaya untuk menyeimbangkan hubungan dengan India dengan membuat kebijakan yang bersifat kontradiktif terhadap kepentingan nasional India.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis hubungan Nepal-India khususnya pada aspek politik dan ekonomi. Adapun judul penelitian yang diangkat oleh penulis adalah **“Analisis Hubungan Nepal-India dalam Aspek Politik dan Ekonomi”**.

### **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dipaparkan diatas, penulis akan membatasi topik dengan berfokus pada *stance* Nepal terhadap dominasi India dalam aspek politik dan ekonomi. Berdasarkan pembatasan ini, penulis merumuskan 2 (dua) poin rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan Nepal-India dalam aspek politik?
2. Bagaimana hubungan Nepal-India dalam aspek ekonomi?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

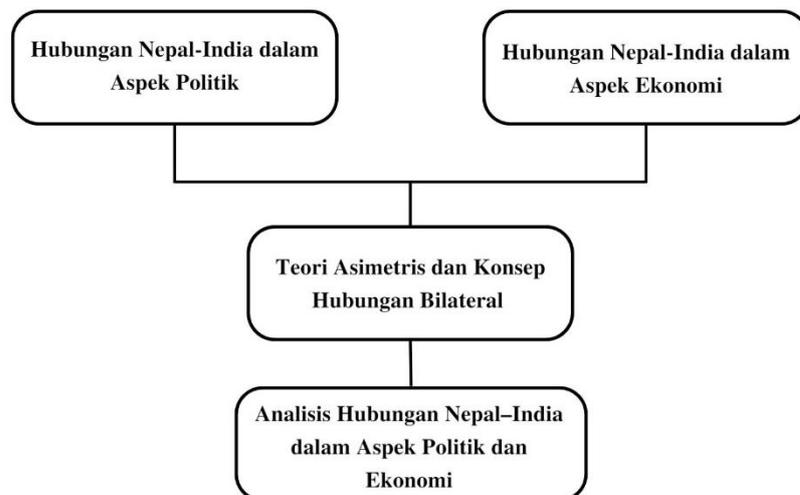
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hubungan Nepal-India dalam aspek politik.
2. Untuk mengetahui hubungan Nepal-India dalam aspek Ekonomi.

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan penulis dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

3. Memberikan pemahaman kepada penulis dan pembaca tentang bagaimana kerja sama bilateral dapat menjadi faktor pendorong dalam pemenuhan kepentingan politik dan ekonomi suatu negara.
4. Memberikan gambaran kepada penulis dan pembaca tentang proses dan dinamika yang dilakukan oleh negara sebagai aktor hubungan internasional dalam lingkup hubungan dan kerjasama bilateral.
5. Dapat digunakan sebagai referensi dalam studi Hubungan Internasional, terutama pada isu ekonomi dan politik asia selatan terutama Nepal-India.

#### **D. Kerangka Konseptual**



**Gambar 1.1. Skema Kerangka Konseptual**

*Sumber: Diolah oleh penulis*

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori Asimetris dan Konsep Hubungan Bilateral yang akan menjelaskan dan menganalisa variabel dalam penelitian ini, yaitu hubungan Nepal-India dalam aspek politik dan ekonomi.

## 1. Teori Asimetris

Teori Asimetris adalah sebuah teori tentang hubungan sebab akibat antara negara besar dan negara kecil, istilah negara besar dan negara kecil merujuk pada pengaruh dan *power* sebuah negara (Kumari & Bharti, 2021). Menurut teori ini, sistem internasional terdiri dari banyak unit yang saling berinteraksi satu sama lain, mulai dari unit mikro hingga unit makro (Yamazaki & Osawa, 2021). Interaksi antar unit dalam sistem internasional, menyebabkan negara kecil mempertaruhkan kedaulatannya ketika menjalin hubungan dengan negara besar karena adanya perbedaan kapasitas. Disisi lain, negara besar cenderung kurang tertarik pada hubungannya dengan negara kecil, hal tersebut dikarenakan negara besar sibuk menangani urusan luar negeri dengan banyak negara, terutama negara-negara besar lainnya, yang menyebabkan negara besar cenderung melihat negara-negara kecil sebagai kepentingan sekunder. Hal tersebut selanjutnya akan menghasilkan mispersepsi dan interaksi struktural yang rumit antara negara besar dan negara kecil.

Perilaku negara besar yang menganggap bahwa negara kecil bukan prioritas sehingga menjadikan mereka sebagai mitra sekunder, yang pada akhirnya mengabaikan atau meremehkan negara kecil. Sehingga negara kecil akan berupaya untuk mengimbangi hubungannya dengan negara besar sampai batas tertentu (Womack, 2006). Oleh karena itu, untuk menghindari mispersepsi dan interaksi struktural yang rumit dalam hubungan antara negara besar dan negara kecil terdapat hal penting yang dapat dilakukan untuk mempertahankan hubungan, yaitu saling menghormati esensi otonomi dan kedaulatan utamanya oleh negara besar terhadap negara kecil. Adanya prinsip saling menghormati dalam hubungan

tersebut akan menciptakan hubungan ideal dan harmonis. Sebaliknya, jika negara besar mengambil tindakan yang mengikis kedaulatan negara kecil, maka negara kecil akan melawan untuk bertahan hidup serta melindungi kedaulatannya. Upaya yang dilakukan oleh negara kecil tersebut dapat merugikan negara besar, terlebih lagi apabila disertai kolaborasi dengan negara besar lainnya yang merupakan saingan dari negara besar pertama (Womack, 2006).

Lebih lanjut Teori Asimetris menyatakan bahwa perbedaan kapasitas dan kekuasaan negara memiliki potensi menciptakan perbedaan persepsi dan kepentingan relatif yang nyata. Asumsi dasar teori ini berkonsentrasi pada dua poin utama (Womack, 2010) yaitu :

**a. Perbedaan *Power***

Teori ini menganggap bahwa perbedaan kapasitas *power* antara negara besar dan negara kecil dalam menjalin hubungan dapat menciptakan perbedaan perspektif dalam merumuskan kebijakan. Perbedaan perspektif tersebut akan menghasilkan kesalahan persepsi struktural dalam menerjemahkan niat negara yang menyebabkan kesalahpahaman tanpa ujung dan pada akhirnya tereskalasi menjadi sebuah konflik (Womack, 2010).

**b. Negara Besar Tidak Dapat Memaksakan Kehendak Terhadap Negara Kecil**

Hubungan antara negara besar dan negara kecil memungkinkan untuk mencapai matriks hubungan yang relatif stabil meskipun dari segi kapasitas, ukuran, pengaruh dan *power* memiliki perbedaan, hal tersebut dapat dicapai melalui negosiasi berdasarkan otonomi dan kedaulatan masing-masing negara. Pernyataan tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Kenneth Waltz, bahwa

tingkat kekalahan negara kecil yang menjalin hubungan dengan negara besar sangat rendah jika dilandasi dengan dasar hubungan yang baik (Waltz, 1979). Negara besar mempunyai tanggung jawab dan peluang untuk memimpin sebuah hubungan, tetapi jika negara besar berupaya mendominasi hubungan dengan negara kecil demi kepentingan sepihak, kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepentingan jangka panjang negara besar (Womack, 2010), dengan alasan tersebut negara besar tidak dapat memaksakan kehendak terhadap negara kecil.

Teori Asimetris ini dapat digunakan untuk menganalisis dasar hubungan asimetris antara dua negara seperti hubungan antara India dengan Nepal. Di dalam setiap hubungan antara negara-negara yang memiliki perbedaan kontras pada segi populasi, ekonomi, dan militer, peluang dan risiko hubungan akan berbeda untuk masing-masing pihak. Sebagai contoh, bagi negara A, sebagai negara besar, menjalin hubungan dengan negara kecil hanya akan mewakili sebagian kecil kepentingan internasionalnya. Sementara bagi negara B, sebagai negara kecil, menjalin hubungan dengan negara-negara besar akan mewakili sebagian besar kepentingan internasionalnya. Pada kondisi hubungan yang demikian makna hubungan bilateral bagi negara B jauh lebih besar dibandingkan bagi negara A.

Bahkan dalam kasus hubungan bilateral bernilai sama, seperti perdagangan, hubungan akan secara proporsional jauh lebih penting bagi negara B daripada bagi negara A. Karena peluang keuntungan yang akan diperoleh negara B jauh lebih besar daripada negara A. Sehingga dapat dilihat bahwa hubungan antara negara A dan negara B bukanlah hanya satu hubungan saja, melainkan dua sub-hubungan yang berbeda yaitu; hubungan negara A ke negara B, dan hubungan negara B ke negara A yang menyebabkan hubungan menjadi jauh lebih kompleks.

Lebih lanjut, berdasarkan teori ini, dampak hubungan asimetris jauh lebih besar pada kasus negara-negara tetangga karena kedekatan wilayah menyebabkan meningkatnya kecenderungan terbentuknya hubungan asimetris. Pernyataan dalam teori ini berlaku untuk hubungan asimetris yang paling damai sekalipun (Womack, 2004).

Pada dasarnya mispersepsi dalam segala jenis hubungan internasional dapat terjadi, namun perbedaan persepsi dan cara menerjemahkan niat antara negara A dan negara B dalam hubungan bilateral yang sifatnya asimetris meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan persepsi sistemik (Jervis, 1976). Negara A cenderung melakukan kesalahan berupa minim atensi terhadap negara B yang menyebabkan kebijakannya terhadap negara B akan kurang terkoordinasi, terputus-putus dan pada akhirnya mencapai titik konflik. Ketika konflik muncul, negara A akan cenderung lambat untuk mengubah kebijakannya secara keseluruhan, dan justru menggunakan kapasitas superiornya untuk mendorong negara B ke dalam situasi yang diinginkan. Sebaliknya negara B cenderung melakukan kesalahan berupa atensi yang berlebihan. Karena negara B cemas dengan perilaku negara A, negara B akan cenderung menerjemahkan tindakan yang dilakukan negara A sebagai tindakan terkoordinasi dan merugikan.

Pada situasi yang demikian pihak pemerintah negara B akan mengawasi negara A dengan seksama. Jika negara A mencoba mendorong negara B ke situasi yang diinginkan, negara B cenderung menerjemahkan tindakan negara A sebagai strategi jahat karena negara B rentan terhadap situasi tersebut yang akan menyebabkan konflik. Pada saat terjadinya konflik, negara A kemungkinan akan

membuat kebijakan yang merugikan negara B, pada saat yang bersamaan negara B akan kehilangan kepercayaan terhadap negara A (Womack, 2004).

Situasi kesalahan persepsi yang demikian akan selalu dihindari oleh negara dalam hubungan bilateral, namun jika kesalahan persepsi terjadi, interaksi negara akan cenderung mengikuti pola yang telah dijelaskan diatas. Meskipun negara A dan negara B berada dalam hubungan interaktif, pandangan bahwa kesalahan persepsi diantara negara besar dan negara kecil dapat membaik dengan sendirinya tidaklah benar, karena situasi konflik yang telah terbentuk akan menyebabkan perilaku negara A menjadi sewenang-wenang terhadap negara B, dan pada akhirnya menghilangkan kepercayaan negara B. Negara B kemudian sekuat tenaga menentang negara A karena merasa dalam bahaya besar. Pada akhirnya negara B kemungkinan akan bersekutu dengan negara ketiga yang lebih besar dari negara A untuk menyeimbangkan hubungan. Namun, pergeseran hubungan yang demikian memungkinkan akan menghasilkan krisis yang lebih tajam, karena negara A kini melihat negara B diperbesar oleh *power* negara besar yang lain (Womack, 2004).

## **2. Konsep Hubungan Bilateral**

Hubungan bilateral didefinisikan sebagai sebuah kondisi yang mendeskripsikan relasi timbal balik antara dua negara. Pendeskripsian mengenai hubungan bilateral selalu dilatarbelakangi oleh kepentingan nasional kedua negara untuk menjalin hubungan serta menciptakan kerjasama, dengan maksud dan motivasi spesifik yaitu mewujudkan perdamaian yang selanjutnya akan menghasilkan hubungan harmonis antara kedua negara. Hubungan bilateral antar

negara mengacu pada hubungan politik, ekonomi, budaya dan sejarah, serta interaksi *people to people* (*Civil Society Bilateral Manual*, 2021).

Hubungan internasional dalam konsep hubungan bilateral selalu dihadapkan pada dua kondisi fundamental, yaitu kerjasama dan konflik. kondisi hubungan internasional ini dapat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu dan pasang surut hubungan internasional. Bentuk hubungan bilateral dalam konteks kerjasama adalah kerjasama bilateral. Dimana kerjasama bilateral dapat juga didefinisikan sebagai kepentingan yang melandasi kesepakatan antara dua negara untuk saling berinteraksi dengan cara dan tujuan berdasarkan kesepakatan bersama.

Menurut Holsti, terbentuknya suatu kerjasama umumnya dilakukan oleh suatu negara dengan cara saling mengusulkan serta mendiskusikan langkah penyelesaian masalah untuk selanjutnya disepakati langkah penyelesaiannya sehingga dapat dihasilkan perjanjian atau istilah lainnya yang mempunyai makna yang sama guna memberikan rasa keamanan bagi kedua pihak (Holsti, 1988). Jika pada upaya penyelesaian masalah, kedua belah pihak mengalami kegagalan untuk memperoleh kesepakatan atau kesepakatan, maka hubungan antar negara yang terlibat tersebut akan bermuara pada konflik dan sebaliknya jika kedua negara berhasil memperoleh sebuah kesepakatan sebagai sebuah solusi diantara kedua belah pihak, maka hubungan di antara kedua tersebut akan menciptakan kerjasama. Berdasarkan pernyataan Holsti diatas, dapat dilihat limitasi konsep yang nyata di antara dua jenis hubungan dalam hubungan internasional, meliputi konflik dan kerjasama.

Dalam menciptakan kerjasama bilateral, masing-masing negara mempunyai tujuan, yang selanjutnya menjadi dasar untuk memformulasikan kebijakan yang terkait dengan kepentingan negaranya. Tujuan-tujuan tersebut merujuk pada kepentingan nasional. Kepentingan nasional merupakan alasan utama sebuah negara untuk memformulasikan kebijakan luar negeri. Sementara kebijakan luar negeri adalah rancangan perilaku yang diformulasikan sebuah negara untuk menyikapi negara luar dalam rangka mewujudkan tujuan nasional yang bersifat khusus untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam agenda kepentingan nasional.

Konsep hubungan bilateral merupakan turunan dari konsep kepentingan nasional. Konsep ini digunakan karena pada hakikatnya negara dalam melakukan hubungan bilateral dilatarbelakangi oleh kepentingan nasional sehingga dapat digunakan untuk menganalisis hubungan bilateral Nepal-India. Mengutip pendapat Hans J.Morgenthau dalam "*The Concept of Interest defined in Terms of power*", Konsep kepentingan Nasional yang dimaksud adalah *power*.

Sementara kepentingan merupakan tiap-tiap politik luar negeri suatu negara yang dilatarbelakangi oleh sebuah kepentingan dimana karakternya cenderung mencakup tiga faktor yaitu kepentingan nasional utama yang dilindungi, kepentingan yang bersifat rasional, dan situasi politik untuk mewujudkan kepentingan tersebut. Morgenthau menerangkan bahwa kepentingan nasional tiap-tiap negara adalah mencari kekuasaan, yaitu terkait hal-hal yang mampu mengakomodasi dan memperkuat kontrol sebuah negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan maupun kontrol tersebut mampu direalisasikan dengan penggunaan strategi kerjasama ataupun paksaan. Menurut Morgenthau terdapat 2

instrumen serta sasaran perilaku negara dalam politik internasional, yaitu kekuasaan (*power*) dan kepentingan (*interest*) (Alstytne & Morgenthau, 1951).

Kepentingan nasional merupakan kunci untuk memahami hubungan internasional yang berpusat pada negara sebagai aktor dominan. Orientasi kebijakan luar negeri didasarkan pada Konsep Kepentingan Nasional. Konsep ini merujuk pada pedoman dasar dari semua tindakan yang diambil oleh suatu negara dalam kebijakan eksternalnya (Metea, 2020). Analisis kepentingan nasional berperan dalam menjelaskan, memprediksi, dan membuat preskripsi terkait perilaku negara di panggung politik internasional (Bakry, 2017). Scott Burchill (Bakry, 2017) mendefinisikan kepentingan nasional sebagai hal yang melatarbelakangi kebijakan luar negeri yang dibuat oleh suatu negara, sedangkan Charles Beard (Bakry, 2017) mendefinisikan kepentingan nasional sebagai motivasi di balik tujuan dan ambisi suatu negara dalam menjalankan hubungan internasional.

Para pemikir HI memiliki pendapat yang berbeda-beda terkait aspek-aspek yang menjadi prioritas dalam kepentingan nasional. Ada yang berpendapat bahwa integritas wilayah, kemerdekaan politik, dan perlindungan institusi pemerintahan merupakan hal-hal pokok yang membentuk kepentingan nasional. Ada pula yang berpendapat bahwa kepentingan nasional berfokus pada swasembada nasional, prestise, dan perluasan wilayah. Sejumlah pemikir HI yang lain justru lebih menekankan pentingnya aspek-aspek moral, legal, dan ideologis saat mengelaborasi konsep kepentingan nasional (Bakry, 2017)

Bruce W. Jentleson mengemukakan bahwa terdapat empat tujuan inti yang akan senantiasa hadir dalam mendefinisikan kepentingan nasional suatu negara

(Jentleson, 2014). Keempat tujuan yang dikenal sebagai '4Ps' *Framework* yaitu *power* (*power*), *peace* (perdamaian), *prosperity* (kemakmuran), dan *principles* (prinsip). Namun penelitian akan berfokus pada tujuan *prosperity* (kemakmuran) yaitu mempromosikan peluang ekonomi dan kemakmuran bagi negara yang mencakup pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inovatif dalam sistem ekonomi internasional (Metea, 2020). Pada prinsipnya negara akan berusaha mengejar kemakmuran melalui kebijakan yang mampu mengakomodasi proses ekspor-impor berbiaya rendah, investasi asing yang menguntungkan, hubungan dagang dengan negara lain, serta penguatan struktur ekonomi internasional yang berdasar pada kapitalisme.

Di antara sekian banyak teori yang menekankan faktor ekonomi dalam kepentingan nasional, terdapat dua mazhab pemikiran yang mendominasi: (1) Mazhab pemikiran ekonomisme yang berfokus pada kebijakan luar negeri yang mengatur keseimbangan dalam perdagangan dan pertumbuhan ekonomi dengan kemakmuran kolektif sebagai tujuan akhir yang hendak dicapai; dan (2) Mazhab imperialisme dan kolonialisme yang lebih mengutamakan kepentingan elit-elit ekonomi, di mana kemakmuran dicapai melalui sektor privat dan upaya-upaya eksploitatif.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan diterapkan oleh penulis adalah metode kualitatif deskriptif sebagai desain penelitian untuk mendeskripsikan “Analisis Hubungan Nepal-India Dalam Aspek Politik Dan Ekonomi”. Metode kualitatif diterapkan karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu mendeskripsikan hasil penemuan data secara menyeluruh. Melalui metode penelitian ini, penulis dapat menentukan situasi suatu peristiwa, aktivitas, dan/atau fenomena. Penelitian kualitatif menelaah fenomena dan aktor serta berusaha memahami proses dan fenomena yang terjadi (Bakry, 2016)

Metode ini dimulai dari memperhatikan dan menelaah fokus fenomena yang akan diteliti dan melihat berbagai aspek subjektif dari perilaku objek. Kemudian melakukan penggalan data berupa bagaimana pemaknaan objek dalam memberikan arti terhadap fenomena yang terkait, lalu dianalisis untuk menarik sebuah kesimpulan. Analisa data dengan pendekatan kualitatif digunakan pada awal mula proses analisis data hingga proses berakhir, dengan maksud untuk memperoleh konsistensi analisis data secara keseluruhan.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur dan media yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal, dokumen resmi, transkrip audiovisual, siaran pers resmi, dan laman web resmi.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Penulis akan menggunakan metode studi pustaka (*library research*) untuk mengumpulkan data dengan cara membaca dan menganalisis sejumlah literatur seperti buku, jurnal, dokumen resmi, transkrip audiovisual, siaran pers resmi, dan laman web resmi yang terkait dengan topik penelitian.

### **4. Teknik Analisis Data**

Penulis akan menerapkan teknik analisis deskriptif ke dalam penelitian ini, dimulai dengan mengkategorisasikan data serupa, setelah itu dibuat interpretasi dengan tujuan mengisi makna pada masing-masing sub-aspek serta kaitan antara satu sub-aspek dengan sub-aspek yang lainnya. Kemudian dilakukan interpretasi atau analisis pada keseluruhan aspek guna mengetahui kaitan makna antara aspek yang satu dengan aspek lainnya yang selanjutnya menjadi pusat penelitian.

Penulis selanjutnya membuat interpretasi data serta menarik kesimpulan akhir yang berbentuk kekhususan. Penggunaan prosedur analisa data diterapkan agar penyajian data lebih substansial dan mudah dimengerti meliputi; pengumpulan data, reduksi data, menampilkan data serta penarikan kesimpulan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori Asimetris

Hubungan Asimetris adalah sebuah struktur hubungan yang dapat ditemukan pada sebagian besar hubungan sosial dan politik diantara pihak-pihak yang tidak setara. Teori asimetris dapat digunakan sebagai sebuah pendekatan struktural praktis dalam hubungan internasional yang membahas realitas mendasar dari kekuatan yang tidak setara pada hubungan antar negara (Basaldú, 2011). Hubungan asimetris juga dapat disebut sebagai hubungan antara yang kecil dan yang besar, yang lemah dan yang kuat, dan yang kaya dan yang miskin (Pfetsch, 2012). Terdapat beberapa contoh hubungan asimetris, seperti pada hubungan Amerika Serikat dan Jepang, Amerika Serikat dan Taiwan, Uni Eropa dan Turki, dimana hubungan negara-negara tersebut menunjukkan hubungan asimetris dikarenakan adanya perbedaan sumber daya dan kapabilitas (Pfetsch, 2012).

Arreguin-Toft (2001) mendefinisikan hubungan asimetris sebagai kondisi dimana terdapat dua buah negara dengan kesenjangan yang besar dalam hal *material power* relatif (Arreguín-Toft, 2001).<sup>1</sup> Kondisi *Power* yang asimetris ini selanjutnya menyebabkan terjadinya hubungan asimetris antara negara (Mack, 2017). Konsekuensi utama dari sebuah hubungan asimetris adalah negara yang lemah cenderung menganggap hubungannya dengan negara yang kuat sebagai hubungan yang sangat penting. selain itu, negara yang kuat dapat menimbulkan ancaman bagi kelangsungan hidup negara yang lemah, sedangkan negara yang

---

<sup>1</sup> *Material power* relatif, *power* yang dimaksud adalah *power* yang dibandingkan dengan *power* negara lain. Akibatnya, kondisi *power* suatu negara dapat diklasifikasikan sebagai negara lemah dan negara kuat, tergantung pada keadaan *power* negara mana suatu negara dibandingkan.

lemah tidak secara langsung mengancam kelangsungan hidup negara yang kuat (Mack, 2017).

Sementara Nutter (Nutter, 1994) memiliki pendapat lain yang menggambarkan hubungan asimetris sebagai *force interface* yaitu kemampuan untuk melibatkan lawan secara militer sebagai kondisi yang diperlukan untuk memaksakan ancaman terhadap negara lain.<sup>2</sup> Di sisi lain Mack memberikan pandangan bahwa dalam sebuah perang asimetris negara yang lemah tidak dapat membahayakan negara yang kuat (Mack, 2017). Namun, kemajuan dan perkembangan teknologi dapat membuat pernyataan Nutter menjadi kurang relevan, karena adanya *Long-Range Strike* (LRS) modern dan senjata siber yang memungkinkan negara-negara marjinal militer dan bahkan aktor non-negara untuk menciptakan strategi atau ancaman terhadap negara lain (Kello, 2013; Saloni-Pasternak, 2020)

Lebih lanjut, Womack (2015) mendefinisikan hubungan asimetris sebagai hubungan di mana terdapat disparitas kemampuan yang cukup besar yang membuat negara kecil secara signifikan lebih terdampak pada hubungannya dengan negara besar, namun kondisi tersebut tidak begitu sedemikian besarnya sehingga negara besar dapat secara sepihak mendikte negara kecil (Womack, 2015). Kemudian terkait dengan negosiasi dalam hubungan asimetris, Habeeb (1988) berpendapat bahwa hasil suatu hubungan bukan hanya ditentukan oleh

---

<sup>2</sup> *Force interface* dapat berupa salah satu dari tiga nilai yang ada yaitu metrik positif, negatif dan atau asimetris: contoh *force interface* positif adalah bentuk Perang Dingin antara AS-Soviet, di mana kedua belah pihak menggunakan strategi senjata nuklir yang mampu menargetkan wilayah teritorial negara lain, contoh *force interface* negatif adalah perang de jure Paraguay di Jerman dari Februari hingga Mei 1945, di mana kedua negara tidak memposisikan perang untuk merugikan pihak lain, dan *force interface* asimetris yaitu pada kasus perang Vietnam, di mana A.S. mampu menciptakan kekuatan di wilayah Vietnam Utara, namun tidak sebaliknya.

*power* secara general semata, melainkan juga terkait *specific power balance*, yang tidak hanya terdiri dari kekuatan material, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat komitmen dan prospek alternatif yang dimiliki oleh setiap aktor dalam suatu hubungan (Mansur & Habeeb, 1990).

Untuk mempertahankan suatu hubungan bilateral agar tetap harmonis, negara besar harus menghormati esensi kedaulatan negara kecil, sehingga hubungan akan tetap pada situasi normal tanpa adanya konflik. Sebaliknya, jika negara besar bertidak mengikis kedaulatan negara kecil, maka negara kecil akan melakukan perlawanan untuk bertahan hidup dan melindungi kedaulatannya. Perlawanan oleh negara kecil dapat merugikan negara besar, terlebih lagi apabila disertai kolaborasi dengan negara besar yang lainnya.

Kondisi yang demikian menyebabkan negara besar merasa tidak dihargai dan berpotensi menyebabkan konflik. Dengan demikian negara kecil perlu untuk mengantisipasi terjadinya konflik dengan menjalin hubungan atau kerjasama dengan negara besar lainnya. Sebagai contoh, Selama Perang Dingin, Vietnam menjadikan Uni Soviet sebagai sekutu melawan dominasi Cina pada tahun 1970-an hingga 1980-an akibatnya Cina merasa bahwa otoritas dan keamanannya terancam oleh aliansi tersebut, yang menyebabkan hubungan politiknya dengan Vietnam memburuk.

Setelah sekian lama hubungan diplomatik kedua negara terisolasi karena runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Vietnam kembali berusaha untuk mendiversifikasi hubungannya dengan negara-negara asia dan bahkan menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Vietnam berhasil bergabung dengan organisasi regional asia tenggara, ASEAN (*Association of Southeast Asian*

*Nations*) pada tahun 1995 dan meningkatkan hubungan dengan AS pada tahun 2013. Selain itu, Vietnam dan Cina juga berhasil memperbaiki hubungan dengan landasan bahwa kedua negara adalah negara sosialis yang tersisa di era pasca Perang Dingin.

Pola ini merupakan pola “*mature asymmetry*,” yaitu, negara besar dapat menunggu untuk menormalkan hubungannya dengan negara kecil (Womack, 2006). Namun karena adanya pasang surut dalam hubungan internasional, hubungan antara Cina dan Vietnam kembali memburuk, di mana keduanya terlibat dalam konflik militer di Laut Cina Selatan. Kondisi ini terjadi dikarenakan Cina menentang dukungan AS terhadap Vietnam. Kondisi tersebut mempunyai kemiripan dengan kondisi dimasa Perang Dingin dimana Cina berusaha menentang hubungan Vietnam dengan Uni Soviet (Sang, 2020).

Lebih lanjut hubungan asimetris juga dapat dilihat antara hubungan Cina dengan Filipina. Sengketa teritorial atas Laut Cina Selatan telah menjadi masalah yang berkepanjangan antara Cina dan Filipina sejak tahun 1970-an. Sengketa tersebut semakin jelas sejak awal 2010-an karena peningkatan armada angkatan laut Cina serta meningkatnya persaingan militer AS-Cina di Indo-Pasifik (O’Rourke, 2021). Setelah tahun 2012, hubungan Cina dan Filipina mengalami ketegangan perihal sengketa Laut Cina Selatan, khususnya terkait Scarborough Shoal. Menanggapi ketegangan situasi tersebut, Filipina memperkuat kerjasama keamanan dengan AS.

Pemerintah Filipina juga mengajukan proses arbitrase atas sengketa yurisdiksi Laut Cina Selatan, dengan merujuk pada Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) pada Januari 2013. Akibatnya Cina

mengkritik keras Filipina dan AS terkait permasalahan maritim tersebut, yang telah menciptakan keadaan geopolitik di Asia Timur menjadi tidak stabil (International Crisis Group, 2015).

Sejak tahun 1951-sekarang, Filipina telah menjalin aliansi dengan AS. Oleh karena itu, Cina waspada terhadap upaya AS membentuk aliansi yang berpusat di Asia dan memprotes bahwa aliansi semacam itu adalah “peninggalan Perang Dingin”. Dari sudut pandang Cina, sistem aliansi regional yang dibentuk oleh AS sejauh ini adalah upaya untuk menekan kekuatannya di Asia. Lebih lanjut, pemerintah AS pada masa kepemimpinan Obama mempromosikan strategi *Rebalancing to Asia*, yang selanjutnya membuat Cina mulai menganggap aliansi AS-Filipina sebagai strategi politik kekuasaan yang ditujukan untuk melemahkan pengaruhnya (Liff, 2018). Dengan demikian menurut teori asimetris terdapat setidaknya 3 indikator utama untuk menentukan suatu hubungan bilateral bersifat asimetris pada aspek politik meliputi:

1. Kepentingan nasional, yaitu dalam menjalin hubungan bilateral kepentingan nasional suatu negara merugikan negara lain.
2. Hubungan politik, yaitu suatu negara mencampuri atau turut andil dalam urusan politik domestik negara lain.
3. Kedaulatan Negara, yaitu suatu negara mempengaruhi kebijakan negara lain sehingga melukai kedaulatan negara yang dipengaruhi.

Sementara itu hubungan asimetris dari segi Ekonomi, Negara besar atau negara yang mempunyai monopoli atas sumber daya tertentu memiliki kemampuan untuk memanfaatkan kekuatan pasarnya sebagai instrumen dalam proses perumusan kebijakan perdagangan terhadap mitranya. Kondisi tersebut

merupakan logika argumen tarif optimal, yang memiliki implikasi bahwa negara besar dapat memperoleh keuntungan melalui perlindungan perdagangan sehingga negara kecil tidak akan memperoleh akses perdagangan kecuali tunduk dan patuh kepada kebijakan yang diterapkan oleh negara besar. Dengan adanya kebijakan pembatasan perdagangan yang berbentuk pemberlakuan tarif, dapat menimbulkan asimetri dalam hubungan bilateral. Kondisi tersebut juga akan menempatkan negara-negara periferal pada posisi yang kurang menguntungkan (Pisani-Ferry, 2021). Dengan mengacu pada penjelasan di atas menurut teori asimetris terdapat setidaknya 2 indikator utama untuk menentukan suatu hubungan bilateral bersifat asimetris pada aspek ekonomi meliputi:

1. Kekuatan Ekonomi, yaitu negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang besar mendominasi hubungan bilateral dengan negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang kecil
2. Hubungan Ekonomi, yaitu perjanjian ekonomi, kerjasama ekonomi, kemitraan ekonomi strategis maupun istilah lain yang mempunyai makna yang sama yang diperoleh melalui hubungan bilateral yang cenderung menguntungkan salah satu diantara kedua negara.

## **B. Konsep Hubungan Bilateral**

Hubungan bilateral didefinisikan sebagai hubungan diplomatik formal antara dua negara yang ada di luar struktur rezim internasional atau lembaga internasional (Ben-Josef Hirsch & Miller, 2021). Hubungan bilateral selalu dilatarbelakangi oleh adanya kepentingan nasional sebuah negara sebagai sebuah faktor utama yang mendorong sebuah negara untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Hubungan bilateral adalah elemen pendiri hubungan internasional, hal

tersebut sebangun dengan pendapat Thomas Gomart bahwa hubungan bilateral merupakan bentuk dasar dari *diplomatic game* (Gomart, 2002). Sentralitas hubungan bilateral dapat dilihat pada tingkat historis, strategis, dan ruang waktu. Pertama, tingkat historis, penggunaan hubungan diplomatik antar negara melalui misi resmi dimulai pada abad ketujuh belas pada era kerajaan Eropa, sehingga juga disebut sebagai diplomasi tradisional atau diplomasi lama. Kemudian, Kongres Westphalia pada tahun 1648 mengakui status yang sama di antara semua negara berdaulat, yang mengakui hubungan bilateral antar negara melalui penerimaan agen konsuler asing (Pannier, 2020).

Diplomasi bilateral di Eropa, tersebar luas hingga Perang Dunia Pertama, yang ditandai dengan adanya peran sentral yang dimainkan oleh kedutaan besar, negosiasi dengan tingkat kerahasiaan tinggi, dan ikatan antar negara yang tercipta melalui perkawinan campur di antara keluarga penguasa kerajaan yang disertai dengan aliansi politik. Kemudian terus berkembang di era kolonialisme dan dekolonisasi sehingga terciptalah berbagai jenis hubungan bilateral antar negara-negara Eropa lainnya dan bahkan antar negara-negara di seluruh dunia (Pannier, 2020).

Peran sentral diplomasi dalam hubungan bilateral kemudian dapat dieksplorasi melalui peran strategisnya dalam mempromosikan kepentingan nasional dan penataan negosiasi internasional. Melalui tingkat kementerian, kedutaan besar, dan konsulat luar negeri, diplomasi bilateral merupakan sebuah instrumen untuk mengejar kepentingan suatu negara, baik melalui perdagangan dan investasi, mempromosikan citra dan budaya suatu negara, dan atau berkomunikasi dengan diaspora (Pannier, 2020). Selain itu, hubungan bilateral

adalah tahapan penting untuk dapat terlibat dalam negosiasi internasional, hal tersebut dikarenakan kepentingan bersama negara pertama kali disatukan pada tingkat bilateral untuk membangun hubungan sehingga selanjutnya kepentingan bersama tersebut dapat dibawa pada tahapan negosiasi multilateral (Pannier, 2020).

Hubungan bilateral dilakukan oleh negara untuk mewujudkan kepentingan nasional. Dengan demikian, hubungan bilateral diasosiasikan dengan interaksi strategis yakni perebutan kekuasaan di mana masing-masing negara didorong oleh kepentingan mereka sendiri dibandingkan untuk mencapai hubungan inklusif. Hubungan bilateral kemudian dikatakan berhasil apabila dalam upaya mengejar kepentingan nasional, masing-masing negara dapat membentuk kerja sama, tanpa merusak kedaulatan dan kebebasan satu sama lain (Devin, 2013).

Karena peran sentral yang telah negara-negara lakukan secara historis dan strategis, hubungan bilateral juga dapat dilihat dari sudut pandang ruang waktu. Meskipun hubungan multilateral telah menjadi semakin beragam dan intens sejak paruh kedua abad kedua puluh, terutama pada 1990-an, dan telah menjadi fokus perhatian dari para sarjana hubungan internasional, hubungan bilateral tetap menjadi sarana populer yang digunakan oleh sebuah negara untuk mencapai kesepakatan internasional. Dari tahun 1990 hingga 1999 misalnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mencatat penandatanganan perjanjian bilateral telah mencapai lebih dari 5000 perjanjian yang jumlahnya terus bertambah hingga saat ini, yang mencakup bidang ekonomi dan keuangan, politik dan militer, dll (Newman, 2006).

Sebagian besar penelitian sebelumnya tentang hubungan bilateral dapat diklasifikasikan menjadi dua fokus utama, yaitu mashab “*economics first*” dan mashab “*politics first*” (Davis & Meunier, 2011). fokus pertama yaitu mashab “*economics first*” menekankan bahwa ekonomi adalah alasan mendasar yang memotivasi negara untuk berinteraksi dengan negara lain. Pendapat ini mengasumsikan bahwa tujuan utama bagi pelaku ekonomi (misalnya konsumen, perusahaan, dan serikat pekerja) atau negara adalah memaksimalkan kesejahteraan ekonomi. Dimana negara akan mempertimbangkan peluang dan keuntungan melakukan hubungan perdagangan dengan negara lain sebelum meruskan kebijakan luar negeri. Oleh karena itu, hubungan antarnegara sebagian besar didorong oleh adanya kepentingan ekonomi (Chen & Zhou, 2021).

Asal-usul mashab “*economics first*” dapat ditelusuri kembali dalam sejarah “commercial peace” (Kant, 2022). Seperti yang diklaim oleh para ekonom neoklasik, perdagangan internasional dapat membuat perekonomian masyarakat suatu negara akan lebih baik daripada jika tetap berada di autarky (Pieńkowski & Zbaraszewski, 2019; Samuelson, 1962).<sup>3</sup> Dalam menjalin hubungan, jika suatu negara memulai konflik atau bahkan menggunakan kapabilitas militer terhadap mitra dagangnya, hal tersebut akan memperburuk atau bahkan memutus hubungan perdagangan sehingga kedua negara akan kehilangan sumber keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, para pemimpin suatu negara akan bertindak secara rasional dan mempertimbangkan peluang keuntungan dalam hubungan perdagangan dibandingkan harus terlibat dalam sebuah konflik (Baldwin, 1980).

---

<sup>3</sup> Dalam pandangan ekonomi liberal (yaitu, klasik atau neoklasik), autarky diasosiasikan dengan perspektif proteksionisme perdagangan ekonomi, ekonomi tertutup, dan ancaman terhadap kesejahteraan.

Semakin banyak hubungan perdagangan antara dua negara maka semakin tinggi peluang keuntungan yang akan diperoleh, dan semakin rendah kemungkinan kedua negara akan terlibat konflik (Polachek, 1980).

Selain peluang keuntungan, penjelasan lain untuk “*commercial peace*” adalah pendapat mengenai *signaling tool* (Gartzke et al., 2001; Morrow, 1999), yang merujuk pada penggunaan pengetahuan asimetris pada model tawar-menawar dalam sebuah hubungan bilateral. Khususnya, terkait pada pertimbangan bahwa perdagangan menciptakan keuntungan ekonomi bagi kedua negara yang menjalin hubungan. *Signaling tool* yang dimaksud adalah apabila adanya kebijakan pembatasan perdagangan yang dilakukan sebuah negara terhadap negara lainnya. Hal tersebutlah yang berfungsi sebagai sinyal atas maksud dan tujuan suatu negara menerapkan kebijakan pembatasan. Semakin banyak hubungan perdagangan antara dua negara maka, akan semakin efektif *signaling tool* tersebut (Chen & Zhou, 2021).

Meskipun aktor negara memiliki tujuan utama untuk memaksimalkan kesejahteraan ekonomi, hubungan perdagangan tidak serta merta mengarah pada perdamaian. Hal tersebut terjadi ketika keuntungan yang diperoleh dari liberalisasi perdagangan tidak didistribusikan secara merata bagi seluruh warga negara, dan bahkan beberapa kelompok yang terlibat dalam perdagangan justru mengalami kerugian. Dengan demikian untuk menentukan apakah hubungan perdagangan mempromosikan perdamaian atau tidak tergantung pada bagaimana berbagai kepentingan aktor sub-nasional disaring oleh lembaga politik domestik (Kastner, 2007; Mansfield & Pollins, 2001). Misalnya, menurut model Heckscher-Ohlin, pemegang pengaruh besar akan mendapatkan keuntungan dari hubungan

perdagangan, tetapi pemegang pengaruh yang relatif lebih kecil akan mengalami kerugian (Klein, 1996). Sehingga pada kondisi yang demikian, hubungan perdagangan justru dapat menyebabkan lebih banyak konflik domestik (Chen & Zhou, 2021).

Mazhab "*politics first*" berpendapat bahwa aktor negara terkadang menempatkan kepentingan keamanan di atas kepentingan ekonomi. Menurut neo-realisme, hubungan perdagangan menghasilkan keuntungan ekonomi sekaligus ancaman bagi negara-negara karena adanya sistem Internasional yang bersifat anarkis (Mearsheimer, 2001; Waltz, 1979). Misalnya, negara yang sangat bergantung dalam sebuah hubungan bilateral akan kehilangan keuntungan perdagangan dan akan menanggung biaya penyesuaian yang sangat besar jika negara mitra membatasi aksesnya ke pasar Internasional. Ketika negara yang mendapatkan pembatasan tersebut berusaha untuk mengurangi ketergantungan melalui penerapan kebijakan balasan maka akan menimbulkan konflik hingga perang (Waltz, 1979).

Grieco (1988) menjelaskan suatu negara mengambil langkah defensif untuk membatasi kerja sama internasionalnya yang disebabkan oleh tidak adanya otoritas yang mampu melindungi suatu negara dari ancaman sistem internasional yang bersifat anarki, terlebih lagi penurunan *relative power* akan mengancam keamanan negara. Oleh karena itu, pemimpin suatu negara secara bijaksana dapat menolak atau membatasi hubungannya dengan negara lain (Grieco et al., 1993). Sehingga dalam praktiknya, negara cenderung mempertimbangkan konsekuensi dari *relative power* sekutu dan saingannya selain pertimbangan keuntungan ekonomi ketika merumuskan kebijakan perdagangan (Gowa, 2020).

### C. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan topik penelitian yang penulis angkat, dan kemudian menjadi inspirasi penulis. Penelitian pertama adalah sebuah jurnal yang berjudul “*Nepal’s Political Relationship with India: Under the Lens of Path Dependency Theory*”. Penelitian ini menganalisis hubungan Nepal-India menggunakan teori dependensi yang menunjukkan kebijakan luar negeri kontemporer Nepal terhadap India berada pada titik kritis karena adanya ketergantungan Nepal terhadap ekonomi India yang mengikis kedaulatan Nepal.

Analisis dalam penelitian ini berpendapat bahwa Nepal dapat menempuh langkah perubahan agar kebijakannya menjadi lebih independen dan tidak terpengaruh oleh pemerintah India. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Nepal dapat memanfaatkan keberhasilan pencapaian demokrasi untuk mematahkan penggunaan pendekatan tradisional dalam membentuk kebijakan terhadap pemerintah India dan menerima dukungan politik dan ekonomi dari Cina serta menerapkan kebijakan baru dengan memanfaatkan organisasi multilateral untuk memperoleh dukungan secara ekonomi dan politik.

Penelitian kedua adalah sebuah jurnal yang berjudul “*Asymmetry Theory and Cina–Philippines Relations with the South Cina Sea as a Case*”. Penelitian ini menganalisis bagaimana faktor asimetri struktural mempengaruhi hubungan Cina-Filipina melalui penggunaan teori asimetris untuk memperdalam pemahaman tentang hubungan Cina dengan Filipina. Menurut penelitian ini hubungan Cina-Filipina dari tahun 2010 hingga 2020 menunjukkan bahwa Cina mengalami kesulitan mengelola hubungannya dengan Filipina karena adanya

hubungan asimetri, yang berasal dari kesenjangan kekuasaan dan status di antara mereka. Struktur asimetris dari interaksi bilateral ini membuat Cina meremehkan dan mengabaikan niat Filipina untuk melawan, yang telah diperjelas secara khusus dalam sengketa Laut Cina Selatan. Akibatnya, hubungan mereka mengalami pasang surut sepanjang tahun 2010-an, khususnya atas masalah kedaulatan maritim.

Penelitian ketiga adalah sebuah buku yang berjudul “*Cina and vietnam: The Politics of Asymmetry*”. Penelitian yang dilakukan oleh Brantly Womack menganalisis hubungan politik Cina-Vietnam menggunakan teori asimetris. Analisis dalam penelitian ini berpendapat bahwa hubungan asimetris antara negara kuat (Cina) dan negara lemah (Vietnam) dipengaruhi oleh faktor perbedaan kapasitas dan skala *Power*. Faktor asimetri tersebut selanjutnya menyebabkan perbedaan sistemik dalam minat dan persepsi antara negara yang lebih kuat dan negara yang lebih lemah. Sehingga terjadi kesalahan persepsi timbal balik yang mengakibatkan memburuknya hubungan Cina-Vietnam.